

**MANUAL INDIKATOR TUJUAN/SASARAN
DINAS PERHUBUNGAN (DISHUB) KOTA PASURUAN
TAHUN 2024**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS HITUNGAN	PERIODE DATA	SUMBER DATA
1	Meningkatkan Konektivitas, Mobilitas, serta Pelayanan Bidang Perhubungan		Indeks Sarana dan Prasarana Perhubungan	Mengukur tingkat ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana yang digunakan dalam sektor perhubungan untuk memantau dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perhubungan yang ada	$(S \times 0.45) + (P \times 0.45) + (L \times 0.05) + (K \times 0.05)$ (P) = Hasil Indikator Persentase Perlengkapan Jalan dalam Kondisi Baik (S) = Hasil Indikator Persentase Sarana LLAJ dalam Kondisi Baik (L) = Hasil Indikator Kelayakan Infrastruktur Pelayaran (belum ada) (K) = Hasil Indikator Persentase Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian dalam Kondisi Baik	Tahunan	Bidang Lalu Lintas; Bidang Angkutan; UPT, Penerangan Jalan Umum
		Meningkatnya Sistem Tata Kelola yang Baik dalam Menjamin Pelayanan Prima	Nilai SAKIP SKPD	Indeks capaian tingkat implementasi SAKIP pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah	$(\frac{\sum \text{Temuan Anggaran yang Ditindaklanjuti}}{\sum \text{Temuan Anggaran}}) \times 100\%$	Tahunan	Penilaian Inspektorat
			Persentase Temuan Anggaran yang Ditindaklanjuti	Temuan-temuan yang ditemukan dalam pengelolaan anggaran yang telah ditindaklanjuti oleh instansi pemerintah setelah dilakukan audit atau evaluasi	Survey Penilaian SAKIP (Dinilai oleh Evaluator SAKIP)	Tahunan	Sekretariat
		Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase Perlengkapan Jalan dalam Kondisi Baik	Perlengkapan jalan adalah bagian dari Prasarana LLAJ sesuai Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Rambu Jalan, Traffic Light, dll.)	$(\frac{\sum \text{Perlengkapan Jalan dalam Kondisi Baik}}{\text{Total Jumlah Perlengkapan Jalan}} \times 100\%) / (\sum \text{Item Perlengkapan Jalan})$	Tahunan	Bidang Lalu Lintas
			Persentase Sarana LLAJ dalam Kondisi Baik	Sarana LLAJ adalah alat-alat pendukung LLAJ seperti barrier, traffic cone, rambu portable dll.	$(\frac{\sum \text{Sarana LLAJ dalam Kondisi Baik}}{\text{Total Jumlah Sarana LLAJ}} \times 100\%) / (\sum \text{Item Sarana LLAJ})$	Tahunan	Bidang Lalu Lintas
		Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Pelayaran	Persentase Pelanggaran di Bidang Pelayaran	Jumlah pelanggaran yang terjadi dalam sektor pelayaran, seperti pelanggaran keselamatan, pelanggaran aturan navigasi, pelanggaran izin operasi, dan pelanggaran lainnya	$(\frac{\text{Jumlah Pelanggaran Pelayaran}}{\text{Total Sample yang Diperiksa}}) \times 100\%$	Tahunan	Bidang Angkutan
		Meningkatnya Keselamatan Perkeretaapian	Persentase Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian dalam Kondisi Baik	Fasilitas keselamatan perkeretaapian yang dinyatakan dalam kondisi baik setelah dilakukan pemeriksaan berkala terhadap sarana dan prasarana kereta api	$(\frac{\text{Fasilitas Perkeretaapian dalam Kondisi Baik}}{\text{Total Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian}}) \times 100\%$	Tahunan	Bidang Angkutan



**MANUAL INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
DINAS PERHUBUNGAN (DISHUB) KOTA PASURUAN
TAHUN 2024**

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS HITUNGAN	PERIODE DATA	SUMBER DATA
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi	Perbandingan Jumlah Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi dengan Seluruh Kebutuhan Penunjang Pemerintahan	$(\frac{\sum \text{Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi}}{\sum \text{Seluruh Kebutuhan Penunjang Pemerintahan}}) \times 100 \%$	TAHUNAN	Sekretariat
2	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja yang Tersusun Tepat Waktu	Perbandingan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang Tersusun Tepat Waktu dengan Seluruh Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	$(\frac{\sum \text{Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang Tersusun Tepat Waktu}}{\sum \text{Seluruh Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang Tersusun}}) \times 100 \%$	TRIBULAN	Sekretariat
3	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	TRIBULAN	Sekretariat
4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	TRIBULAN	Sekretariat
5	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	TRIBULAN	Sekretariat
6	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang Tersusun Tepat Waktu	Perbandingan Laporan Keuangan yang Tersusun Tepat Waktu dengan Jumlah Seluruh Laporan Keuangan yang Tersusun	$(\frac{\sum \text{Laporan Keuangan yang Tersusun Tepat Waktu}}{\sum \text{Seluruh Laporan Keuangan yang Tersusun}}) \times 100 \%$	TRIBULAN	Sekretariat
7	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	TRIBULAN	Sekretariat
8	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	TRIBULAN	Sekretariat
9	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang Tersusun Tepat Waktu	Perbandingan Laporan BMD Tepat Waktu dengan Jumlah Seluruh Laporan BMD	$(\frac{\sum \text{Laporan BMD Tepat Waktu}}{\sum \text{Seluruh Laporan BMD}}) \times 100 \%$	TRIBULAN	Sekretariat
10	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	TRIBULAN	Sekretariat

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS HITUNGAN	PERIODE DATA	SUMBER DATA
11	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang Meningkatkan Kompetensinya	Perbandingan SDM yang Meningkatkan Kompetensinya dengan Seluruh SDM Aparatur	$(\frac{SDM \text{ Aparatur yang Meningkatkan Kompetensinya}}{\{\text{Seluruh SDM Aparatur}\}}) \times 100 \%$	TRIBULAN	Sekretariat
12	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	TRIBULAN	Sekretariat
13	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	TRIBULAN	Sekretariat
14	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya Layanan Administrasi Perkantoran	Perbandingan Layanan Administrasi Perkantoran yang Terpenuhi dengan Jumlah Seluruh Kebutuhan Layanan Administrasi Perkantoran	$(\frac{\text{Layanan Administrasi Perkantoran yang Terpenuhi}}{\{\text{Seluruh Kebutuhan Layanan Administrasi Perkantoran}\}}) \times 100 \%$	TRIBULAN	Sekretariat
15	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	TRIBULAN	Sekretariat
16	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	TRIBULAN	Sekretariat
17	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	TRIBULAN	Sekretariat
18	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	TRIBULAN	Sekretariat

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS HITUNGAN	PERIODE DATA	SUMBER DATA
19	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	TRIBULAN	Sekretariat
20	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	TRIBULAN	Sekretariat
21	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran	Perbandingan Jasa Penunjang Layanan Perkantoran yang Terpenuhi dengan Jumlah Seluruh Jasa Penunjang Layanan Perkantoran	$(\frac{\text{Jasa Penunjang Layanan Perkantoran yang Terpenuhi}}{\text{Seluruh Jasa Penunjang Layanan Perkantoran}}) \times 100\%$	TRIBULAN	Sekretariat
22	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	TRIBULAN	Sekretariat
23	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	TRIBULAN	Sekretariat
24	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	TRIBULAN	Sekretariat
25	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	Perbandingan Jumlah BMD yang Terpelihara dengan Jumlah Seluruh BMD	$(\frac{\text{Jumlah BMD yang Terpelihara}}{\text{Seluruh BMD}}) \times 100\%$	TRIBULAN	Sekretariat
26	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	TRIBULAN	Sekretariat
27	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	TRIBULAN	Sekretariat

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS HITUNGAN	PERIODE DATA	SUMBER DATA
28	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	TRIBULAN	Sekretariat
29	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	TRIBULAN	Sekretariat
30	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Kelayakan Perengkapan Jalan	Perbandingan Jumlah Persentase Rata-Rata Perengkapan Jalan yang Tersedia dengan Jumlah Item Perengkapan Jalan	$\frac{\sum \text{Perengkapan Jalan dalam yang Tersedia}}{\sum \text{Item Perengkapan Jalan}} \times 100$	TAHUNAN	Bidang Lalu Lintas; UPT. Penerangan Jalan Umum
31	Kegiatan Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Menurunnya Angka Kecelakaan	Perbandingan Selisih Jumlah Kecelakaan Tahun Lalu dan Jumlah Kecelakaan Tahun Berjalan dengan Jumlah Kecelakaan Tahun Lalu	$\frac{((\text{Jumlah Kecelakaan Tahun } (n-1)) - (\text{Jumlah Kecelakaan Tahun } n))}{(\text{Jumlah Kecelakaan Tahun } (n-1))} \times 100 \%$	TRIBULAN	Bidang Lalu Lintas; UPT. Penerangan Jalan Umum
32	Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	TRIBULAN	UPT. Penerangan Jalan Umum
33	Sub Kegiatan Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Jumlah Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Jumlah Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	TRIBULAN	Bidang Lalu Lintas
34	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	TRIBULAN	UPT. Penerangan Jalan Umum
35	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Jumlah Perengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Jumlah Perengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Jumlah Perengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	TRIBULAN	Bidang Lalu Lintas
36	Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Fasilitas Utama dan Pendukung Terminal dalam Kondisi Layak	Perbandingan Jumlah Fasilitas Utama dan Pendukung Terminal yang Tersedia dengan Fasilitas Utama dan Pendukung Terminal yang Wajib Disediakan	$\frac{(\sum \text{Fasilitas Utama dan Pendukung Terminal yang Tersedia})}{(\sum \text{Fasilitas Utama dan Pendukung Terminal yang Wajib Disediakan})} \times 100 \%$	TRIBULAN	Bidang Angkutan

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS HITUNGAN	PERIODE DATA	SUMBER DATA
37	Sub Kegiatan Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal yang Direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal yang Direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal yang Direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	TRIBULAN	Bidang Angkutan
38	Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Parkir yang Tertib	Perbandingan Jumlah Titik Parkir Tertib (Tanpa Aduan Pelanggaran Jukir) dengan Jumlah Titik Parkir Keseluruhan	$(\sum \text{Titik Parkir Tertib}) / (\sum \text{Titik Parkir}) \times 100 \%$	TRIBULAN	Bidang Lalu Lintas
39	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	TRIBULAN	Bidang Lalu Lintas
40	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Ketercapaian Kinerja Sub Kegiatan	Perbandingan Jumlah Capaian Hasil Sub Kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor dengan Jumlah Sub Kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor yang Dampu	$(\sum \text{Capaian Hasil Sub Kegiatan}) / (\sum \text{Sub Kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor yang Dampu}) \times 100 \%$	TRIBULAN	UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor
41	Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	TRIBULAN	UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor
42	Sub Kegiatan Peneliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	TRIBULAN	UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor
43	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekrutasi Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekrutasi Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota yang Diselesaikan	Perbandingan Jumlah Laporan Manajemen dan Rekrutasi Lalu Lintas yang Disepakati dalam FLAI dengan Jumlah Laporan Manajemen dan Rekrutasi Lalu Lintas yang Dibahas dalam FLAI	$(\sum \text{Laporan Manajemen dan Rekrutasi Lalu Lintas yang Disepakati dalam FLAI}) / (\sum \text{Laporan Manajemen dan Rekrutasi Lalu Lintas yang Dibahas dalam FLAI}) \times 100 \%$	TRIBULAN	Bidang Lalu Lintas
44	Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	TRIBULAN	Bidang Lalu Lintas
45	Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota yang Diselesaikan	Perbandingan Jumlah Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jaringan Kabupaten/Kota yang Diselesaikan dengan Jumlah Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jaringan Kabupaten/Kota yang Wajib Diselesaikan	$(\sum \text{Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jaringan Kabupaten/Kota yang Diselesaikan}) / (\sum \text{Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jaringan Kabupaten/Kota yang Wajib Diselesaikan}) \times 100 \%$	TRIBULAN	Bidang Lalu Lintas

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS HITUNGAN	PERIODE DATA	SUMBER DATA
46	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	TRIBULAN	Bidang Lalu Lintas
47	Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang Terawasi	Jumlah Laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang Terawasi	Jumlah Laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang Terawasi	TRIBULAN	Bidang Lalu Lintas
48	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ruas Jalan yang Terlayani Angkutan Umum	Perbandingan Jumlah Ruas Jalan yang Terlayani Angkutan Umum dengan Jumlah Ruas Jalan	$(\sum \text{Ruas Jalan yang Terlayani Angkutan Umum}) / (\sum \text{Ruas Jalan}) \times 100 \%$	TRIBULAN	Bidang Angkutan
49	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	TRIBULAN	Bidang Angkutan
50	Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	TRIBULAN	Bidang Angkutan
51	Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rencana Umum Jaringan Trayek yang Diselesaikan Tepat Waktu	Perbandingan Jumlah Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek yang Diselesaikan Tepat Waktu dengan Jumlah Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek yang Tersusun	$(\sum \text{Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek yang Diselesaikan Tepat Waktu}) / (\sum \text{Seluruh Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek yang Tersusun}) \times 100 \%$	TRIBULAN	Bidang Angkutan
52	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	TRIBULAN	Bidang Angkutan
53	Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	TRIBULAN	Bidang Angkutan
54	Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Diselesaikan Tepat Waktu	Perbandingan Jumlah Laporan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang yang Diselesaikan Tepat Waktu dengan Jumlah Laporan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang yang Tersusun	$(\sum \text{Laporan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang yang Diselesaikan Tepat Waktu}) / (\sum \text{Seluruh Laporan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang yang Tersusun}) \times 100 \%$	TRIBULAN	Bidang Angkutan

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS HITUNGAN	PERIODE DATA	SUMBER DATA
55	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	TRIBULAN	Bidang Angkutan
56	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Peningkatan Kedatangan Kapal (Ships Call)	Perbandingan Selisih Jumlah Ship Call Tahun Berjalan dan Jumlah Ship Call Tahun Lalu dengan Jumlah Ship Call Tahun Lalu	$(\text{Jumlah Ship Call Tahun } (n) - \text{Jumlah Ship Call Tahun } (n-1)) / (\text{Jumlah Ship Call Tahun } (n-1)) \times 100 \%$	TAHUNAN	Bidang Angkutan
57	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Izin Usaha Angkutan Laut yang Diselesaikan	Perbandingan Fasilitas Izin Usaha Angkutan Laut yang Dilaksanakan dan Fasilitas Izin Usaha Angkutan Laut yang Wajib Dilaksanakan	$(\text{Fasilitas Izin Usaha Angkutan Laut yang Dilaksanakan}) / (\text{Fasilitas Izin Usaha Angkutan Laut yang Wajib Dilaksanakan}) \times 100 \%$	TRIBULAN	Bidang Angkutan
58	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	TRIBULAN	Bidang Angkutan
59	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	Persentase Fasilitas Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha yang Diselesaikan	Perbandingan Fasilitas Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan dengan Fasilitas Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau yang Wajib Dilaksanakan	$(\text{Fasilitas Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan}) / (\text{Fasilitas Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau yang Wajib Dilaksanakan}) \times 100 \%$	TRIBULAN	Bidang Angkutan
60	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	TRIBULAN	Bidang Angkutan
61	Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Fasilitas Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau yang Tersesalkan	Perbandingan Fasilitas Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan dengan Fasilitas Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau yang Wajib Dilaksanakan	$(\text{Fasilitas Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan}) / (\text{Fasilitas Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau yang Wajib Dilaksanakan}) \times 100 \%$	TRIBULAN	Bidang Angkutan
62	Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan	TRIBULAN	Bidang Angkutan

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS HITUNGAN	PERIODE DATA	SUMBER DATA
63	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Persentase Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Perlintasan Kereta Api	Perbandingan Jumlah Persentase Rata-Rata Fasilitas Keselamatan KA dalam Kondisi Baik dengan Jumlah Item Fasilitas Keselamatan KA	($\frac{\sum \text{Fasilitas Keselamatan KA dalam Kondisi Baik}}{\sum \text{Fasilitas Keselamatan KA}} \times 100 \%$) / ($\sum \text{Item Fasilitas Keselamatan KA}$)	TAHUNAN	Bidang Angkutan
64	Kegiatan Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Persentase Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian yang Tersesalkan Tepat Waktu	Perbandingan Jumlah Fasilitas Keselamatan KA yang Disediakan pada Tahun Berjalan dengan Jumlah Fasilitas Keselamatan KA yang Wajib Disediakan	($\frac{\sum \text{Fasilitas Keselamatan KA yang Disediakan pada Tahun Berjalan}}{\sum \text{Fasilitas Keselamatan KA yang Wajib Disediakan}} \times 100 \%$)	TRIBULAN	Bidang Angkutan
65	Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian	TRIBULAN	Bidang Angkutan

